

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi sistem pembayaran pada kegiatan transaksi atau kegiatan ekonomi semakin hari semakin berkembang. Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup segala peraturan untuk memindahkan dana antar kedua pihak (Bank Indonesia, 2011). Sejarah perkembangan sistem pembayaran dimulai dari kegiatan barter, namun seiring kebutuhan manusia yang semakin kompleks barter terdapat banyak kelemahan salah satunya sulit mencari kecocokan barang yang diminta serta sulit menentukan ketepatan nilai barang atau jasa yang ditukarkan (Sukirno, 2012). Barter kemudian tergantikan oleh emas dan perak sebagai alat pembayaran, namun alat pembayaran tersebut masih kurang efektif dan efisien sehingga uang fiat digunakan sebagai terobosan baru dalam evolusi pembayaran. Uang fiat merupakan uang yang digunakan oleh masyarakat dan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi.

Pengaruh uang dalam perekonomian dapat dilihat pada fenomena krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Dana perbankan ditarik oleh masyarakat secara besar-besaran, sistem pembayaran menjadi terganggu, melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis moneter pada saat itu. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan penyuntikan dana besar-besaran ke sektor perbankan sehingga menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Kenaikan harga pada saat itu mencapai 77 persen menyebabkan kebutuhan uang menjadi lebih besar untuk bertransaksi sehingga masyarakat lebih memilih alat pembayaran yang lebih likuid (Priscylia, 2014).

Perkembangan teknologi telah menyentuh berbagai sektor termasuk sektor ekonomi dan perbankan. Saat ini peran pembayaran uang tunai mulai tergeser karena perkembangan teknologi. Kehadiran alat pembayaran yang berinovasi dapat mengubah pembayaran tunai menjadi non tunai dapat dimanapun dan kapanpun (Polontalo,dkk.2018). Berkembangnya aplikasi belanja online memicu pembayaran non tunai semakin menjadi tren masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Perilaku belanja online yang semakin diminati masyarakat mengakibatkan uang tunai tergantikan oleh pembayaran non tunai dengan cara transfer antar atau intra bank melalui jaringan internal bank.

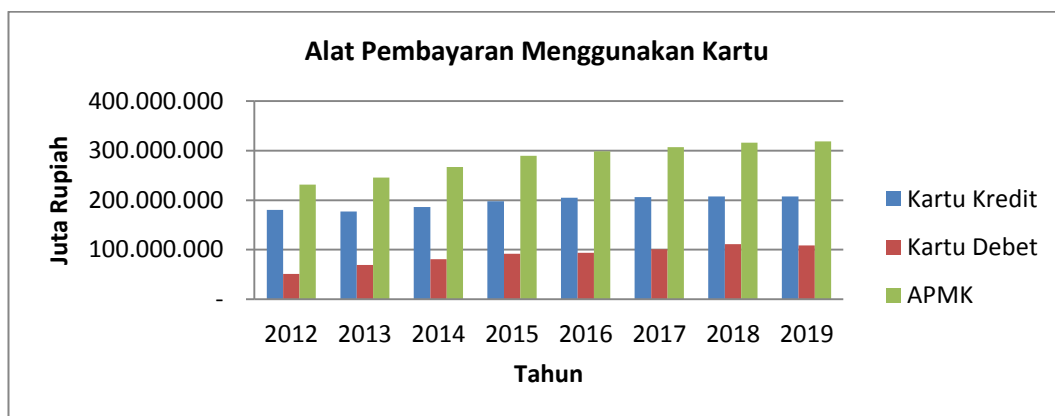
Inovasi alat pembayaran yang hadir saat ini bertujuan untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam bertransaksi. Pembayaran melalui non tunai dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan seperti perampokan dan pencurian karena masyarakat tidak perlu memegang uang tunai dalam jumlah besar. Salah satu program yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2014 yakni Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan tersebut berupaya mendorong masyarakat Indonesia agar bertransaksi menggunakan alat pembayaran non tunai (*less cash society*) seperti negara-negara lain.

Bank Indonesia Real Time atau dikenal dengan BI-RTGS merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pada sistem ini, Bank Indonesia tidak hanya sebagai penyelenggara namun juga bertindak sebagai peserta. Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* hadir sebagai sarana transfer melalui elektronik yang dilakukan individual per transaksi. Selain itu, terdapat sistem pembayaran lain yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Sistem kliring digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transfer dana

dan kliring berjadwal untuk memproses data secara elektronik (Bank Indonesia,2019).

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dapat dilihat pada transaksi jumlah besar dan transaksi jumlah kecil yang dilakukan melalui *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan transaksi melalui transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat Selain BI-RTGS dan sistem kliring terdapat sistem pembayaran non tunai lain yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau sering disebut APMK.

Menurut Bank Indonesia Alat Pembayaran Menggunakan Kartu meliputi seluruh instrumen sistem pembayaran berbasis kartu yaitu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kehadiran fasilitas kartu debit dan ATM menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan instrumen *cashless* merasa lebih nyaman, cepat dan aman sehingga perlahan dapat mensubstitusi penggunaan uang kartal (Fatmawati dan Yuliana 2019).



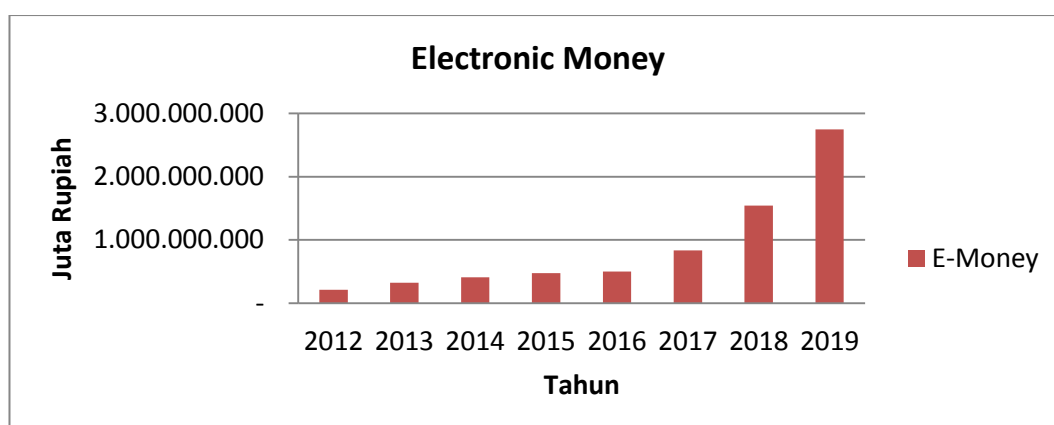
Sumber: Bank Indonesia, 2020

Gambar 1.1 Perkembangan APMK Indonesia Tahun 2012-2019

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan APMK di Indonesia memiliki kecenderungan tren naik. Hal tersebut menandakan APMK semakin diminati

dengan segala kelebihanannya. Terbukti sejak tahun 2012 jumlah APMK yang beredar dimasyarakat sebesar 231.710.889 Juta Rupiah dengan 180.569.919 kartu kredit dan 51.140.970 Juta Rupiah kartu debit. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun berikutnya hingga tahun 2019 mencapai 318.707.353 Juta Rupiah dengan rincian kartu debit sebesar 111.471.277 Juta Rupiah dan kartu kredit sebesar 207.236.076 Juta Rupiah.

Berkembangnya teknologi tidak hanya dirasakan oleh pengguna APMK saja, namun juga memunculkan alat pembayaran baru yang lebih efektif dan efisien. E-payment atau sistem pembayaran secara elektronik merupakan sistem pembayaran baru yang menarik perhatian masyarakat. Beberapa bentuk sistem pembayaran yang disebutkan dalam publikasi Bank Indonesia, diantaranya: *E-Wallet*, *E-Cash*, *electronic cheque*, ataupun *smartcard* berupa *E-Money* (electronic money) yang menjadi incaran masyarakat dalam melakukan pembayaran.



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Gambar 1.2 Perkembangan *E-Money* di Indonesia Tahun 2012-2019

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan *E-Money* di Indonesia sama seperti perkembangan APMK yaitu memiliki kecenderungan tren naik. Hal tersebut menandakan *E-Money* juga diminati oleh masyarakat Indonesia karena

kelebihannya. Terbukti sejak tahun 2012 jumlah *E-Money* yang beredar dimasyarakat sebesar 214.502.953 Juta Rupiah dan terus naik ke tahun berikutnya sampai pada tahun 2019 sebesar 2.747.289.404 Miliar Rupiah.

Alternatif sistem pembayaran yang semakin canggih dan efisien dapat mengurangi jumlah uang tunai yang diminta oleh masyarakat. Penggunaan alat pembayaran non tunai dapat menjangkau ke semua elemen masyarakat memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral (Costa dan Grouwe, 2001). *Base money* dapat memengaruhi tugas Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nursari (2019), Teknologi yang semakin canggih akan memberikan implikasi terhadap peran *base money* dalam transaksi pembayaran semakin berkurang. Jika masyarakat lebih memilih bertransaksi menggunakan uang elektronik, uang yang dibutuhkan masyarakat menjadi sedikit. Berbeda jika masyarakat bertransaksi menggunakan uang tunai, maka masyarakat membutuhkan uang tunai atau uang kartal lebih banyak.

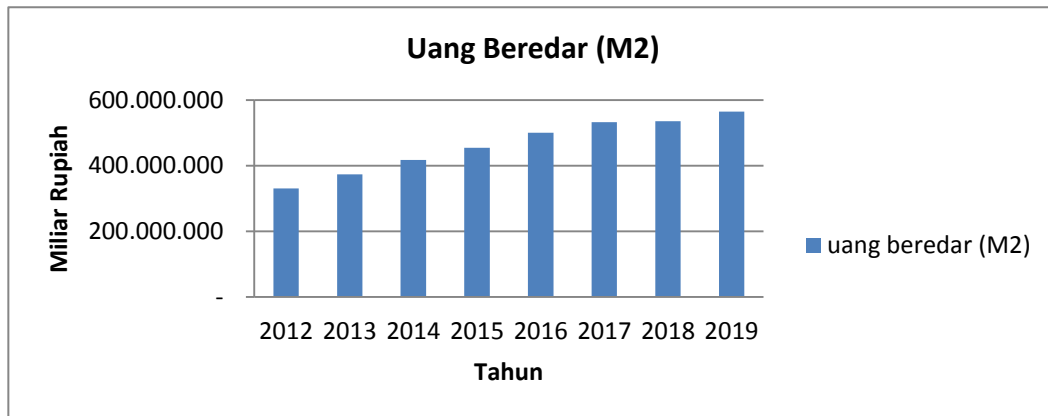
Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi permintaan uang. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi pilihan seseorang untuk menentukan kekayaannya. Seseorang akan memilih antara memegang uang atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan berspekulasi melalui surat-surat berharga yang dimiliki. Hal ini didasari oleh teori permintaan uang yang dikemukakan oleh Keynes bahwa terdapat tiga motif masyarakat memegang uang yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi (Priscylia, 2014).

Suku bunga yang digunakan sebagai acuan untuk mengendalikan jumlah peredaran uang adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Berdasarkan Direksi BI No. 31/67/Kep/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang

perdagangan dan penerapan SBI serta intervensi rupiah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengakui utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Apabila tingkat bunga SBI tinggi maka masyarakat tertarik membeli SBI dengan harapan untung yang didapatkannya dari bunga sehingga mengakibatkan peningkatan masyarakat untuk melakukan spekulasi dan menurunkan permintaan uang untuk transaksi.

Bank sentral bertugas memantau tingkat pertumbuhan suku bunga untuk menjaga kestabilan jumlah uang. Dornbusch dan Fisher (2008) mengemukakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan jumlah uang yang diminta sehingga permintaan uang sangat berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal tersebut dapat terlihat ketika seseorang menyimpan uangnya di bank, maka akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang ditetapkan. Apabila uang mengalami kestabilan dapat berdampak pada peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi dunia usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik konsumsi maupun investasi. Kestabilan peredaran uang mengakibatkan kegiatan perekonomian nasional dapat berkembang.

Peningkatan konsumsi masyarakat mengakibatkan jumlah uang beredar selalu naik dari waktu ke waktu. Jumlah uang yang beredar dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu peredaran uang M1 dan M2. M1 yaitu mencakup uang giral ditambah dengan uang kartal, sedangkan M2 mencakup M1 ditambah dengan uang kuasi yang terdiri atas deposito dan tabungan (Hidayat,dkk 2006).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2012-2019

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia memiliki kecenderungan tren naik setiap tahunnya. Pada tahun 2012 berada pada angka 3.750.755 Milliar Rupiah dan pada tahun 2017 berada pada angka 5.321.432 Milliar Rupiah, angka terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019. Perkembangan jumlah uang beredar paling besar berada pada tahun 2011 yaitu 16,42 persen.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhari (2015), menunjukkan pengaruh hubungan jangka pendek dan jangka panjang dalam pembayaran non tunai meliputi kartu debit, kartu kredit dan *e-money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran non tunai memiliki pengaruh positif terhadap permintaan uang dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat suku bunga deposito berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang. Hal ini sesuai dengan teori *Cambridge* yang menyatakan, apabila tingkat suku bunga naik masyarakat cenderung mengurangi uang kas karena memiliki biaya kesempatan. Masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank karena lebih menguntungkan ketika suku bunga naik.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Widodo(2015), menunjukkan bahwa dalam hubungan jangka panjang maupun jangka pendek transaksi

APMK memiliki hubungan negatif terhadap permintaan uang kartal. Hubungan tersebut disebabkan karena APMK memiliki tingkat *awareness* yaitu kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi. Secara perlahan dapat tercipta *lesh cash* dalam bertransaksi sehingga APMK dapat mensubstitusi penggunaan uang kartal.

Berkembangnya aplikasi belanja online membuat masyarakat menjadi gemar berbelanja secara online karena kemudahan dan besaran diskon yang ditawarkan. Kegiatan belanja secara online membuat masyarakat dituntut untuk membayar secara non tunai, sehingga transaksi non tunai saat ini berkembang pesat di Indonesia. Penelitian ini menambah instrumen pembayaran non tunai yang lain berupa BI-RTGS dan sistem kliring. Variabel tingkat suku bunga kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga ditambahkan untuk melihat seberapa pengaruhnya terhadap permintaan uang di Indonesia. Sistem alat pembayaran pada penelitian ini digambarkan oleh APMK, *E-Money*, BI-RTGS dan sistem kliring. Peredaran jumlah uang tidak hanya dipengaruhi oleh PDB namun juga teknologi pembayaran dan tingkat suku bunga.

Fenomena peningkatan pembayaran non tunai di Indonesia dan hasil penjelasan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menindaklanjuti penelitian dengan judul *Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai dan Suku dan Suku Bunga Kebijakan Terhadap Permintaan Uang di Indonesia (Periode 2012-2019)*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh hubungan jangka panjang dan pendek pembayaran non tunai terhadap permintaan uang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh hubungan jangka panjang dan pendek tingkat suku bunga kebijakan (*BI Rate*) terhadap permintaan uang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh hubungan jangka panjang dan pendek pembayaran non tunai terhadap permintaan uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh hubungan jangka panjang dan pendek tingkat suku bunga kebijakan (*BI Rate*) terhadap permintaan uang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah pengetahuan sekaligus guna mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

1.4.2 Manfaat bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan secara luas serta dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab dan solusi serta permasalahan perekonomian khususnya sistem pembayaran.

1.4.3 Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil keputusan yang tepat sebagai upaya memperlancar stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi melalui efektifitas sistem pembayaran non tunai di Indonesia.